



Optimasi TIK di Sektor Keuangan dan Ekonomi, Studi Kasus Kabupaten Banyuwangi

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Brigita P. Manohara Institut Pemerintahan Dalam Negeri DIP.13.775@ipdn.ac.id Ismail Nurdin Institut Pemerintahan Dalam Negeri ismailnurdin@ipdn.ac.id Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng Institut Pemerintahan Dalam Negeri zubakhrum@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Manohara, B. P., Nurdin, I., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Optimasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di sektor Keuangan dan Ekonomi: Studi Kasus Kabupaten Banyuwangi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 232-239.

Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa transformasi signifikan dalam pengelolaan sektor keuangan dan ekonomi di tingkat daerah. Kabupaten Banyuwangi, sebagai daerah otonom yang merupakan hasil implementasi desentralisasi adalah salah satu daerah yang aktif mengadopsi inovasi teknologi. Wilayah ini telah memanfaatkan TIK untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Studi ini menganalisis optimasi TIK dalam sektor keuangan dan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, dengan fokus pada implementasi sistem e-budgeting, e-procurement, dan platform digital untuk pelayanan publik. Hasil studi menunjukkan bahwa TIK telah berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mempercepat proses administrasi, dan mendorong partisipasi masyarakat. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, dan keamanan data masih perlu diatasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis data sekunder, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat infrastruktur TIK, meningkatkan kapasitas SDM, dan mengembangkan kebijakan inklusif guna memastikan manfaat TIK dapat dirasakan secara merata. Studi ini menyimpulkan bahwa optimasi TIK di Kabupaten Banyuwangi dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mendukung pembangunan keuangan dan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Desentralisasi, Desentralisasi Fiskal, TIK, sektor keuangan, ekonomi, e-government, Kabupaten Banyuwangi.

Abstract

The development of Information and Communication Technology (ICT) has brought significant transformation in the management of financial and economic sectors at the local level. Banyuwangi Regency, as an autonomous region resulting from the implementation of decentralization, is one of the regions that actively adopts technological innovation. The region has utilized ICT to improve efficiency, transparency and accountability in local financial management and drive economic growth. This study analyzes ICT optimization in the financial and economic sectors in Banyuwangi Regency, focusing on the implementation of e-budgeting systems, e-procurement, and digital platforms for public services. The study results show that ICT has played an important role in increasing local own-source revenue (PAD), accelerating administrative processes, and encouraging community participation. However, challenges such as the digital divide, limited human resource capacity, and data security still need to be addressed. Through a qualitative approach with literature review and secondary data analysis, this study provides recommendations for strengthening ICT infrastructure, improving human resource capacity, and developing inclusive policies to ensure the benefits of ICT can be felt equally. This study concludes that ICT optimization in Banyuwangi Regency can serve as a model for other regions in supporting sustainable and inclusive financial and economic development.

Keywords: Decentralization, Fiscal Decentralization, ICT, financial sector, economy, e-government, Banyuwangi Regency.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak potensi sumber daya, mulai dari potensi hutan, laut, tambang, tanah, air, udara, hingga pariwisata (Khairally, 2023). Reformasi yang terjadi di tahun 1998 mendorong pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menerapkan sistem otonomi sebagai realisasi dari desentralisasi guna meningkatkan inovasi, kreativitas serta partisipasi Masyarakat di masing-masing daerah (Azikin, 2018).

Secara umum, Winarna Surya Adisubrata (Adisubrata, 2003) menjelaskan otonomi dengan 3 (tiga) penjelasan, yakni hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, wewenang mengatur daerah sendiri, serta memiliki kewajiban mengatur rumah tangga sendiri (RI, 2018). Selain itu, otonomi juga memberikan kesempatan kepada kepala daerah tingkat I (Gubernur) untuk melaksanakan peran sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Pemerintah daerah selanjutnya bertujuan untuk memperkuat integrasi bangsa, mendemokratisasikan pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberdayakan masyarakat setempat, serta meningkatkan toleransi atas keberagaman yang ada (Lestari, 2023). Penyelenggaraan Pemerintahan dengan konsep Desentralisasi yang penataannya tertuang melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan melalui skema berikut ini:

Gambar 1
Pemerintahan sesuai konsep desentralisasi (RI, 2018)

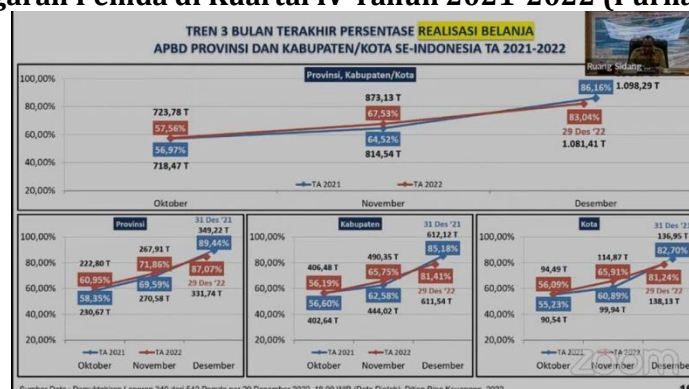


Sumber: Data Primer, 2025

Dengan demikian kebijakan mengenai otonomi daerah serta desentralisasi memberi kesempatan dalam perubahan sistem administrasi daerah, politik, budaya, sistem pemerintahan serta pengelolaan keuangan yang sasaran utamanya adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Suriadi, Frinaldi, Magriasti, & Yandri, 2024). Dalam hal desentralisasi ekonomi untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah diharapkan dapat menggunakan dengan efisien dan menjamin pelayanan agar tetap efektif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak didapati pemerintah daerah yang belum optimal memanfaatkan anggarannya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyayangkan angka capaian realisasi APBD pada akhir Oktober 2021 yang baru mencapai 59,62% atau setara Rp.730,13 triliun dari total anggaran sebesar Rp. 1.224,73 triliun (Habibah, 2021). Dengan nilai anggaran yang sudah dinaikkan dibanding dengan tahun sebelumnya, kondisi ini kurang optimal mengingat surplus belanja hingga pertengahan November 2021 masih di kisaran 15,27% atau setara Rp. 111,52 triliun. Surplus anggaran di tahun 2021 ini terjadi di 493 daerah, dengan rincian 88 Kota, 375 Kabupaten dan 30 provinsi (Putri, 2021). Kondisi ini menurut Sri Mulyani perlu mendapat perhatian dan evaluasi khusus terutama dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa hal mengenai APBD yang oleh Menkeu wajib segera dibenahi pemerintah daerah adalah ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD, pola realisasi APBD, serta pemenuhan belanja wajib di daerah (Santia, 2022).

Pasca kritikan menkeu karena belum optimalnya APBD di banyak daerah, perbaikan terus dilakukan. Namun demikian, catatan kemendagri di tahun 2022 serapan APBD Pemda masih di bawah 90%. Kondisi ini perlu dicermati mengingat anggaran yang sudah ditetapkan melalui Perda di masing-masing wilayah perlu dimaksimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat. peningkatan serapan APBD di berbagai wilayah di Indonesia pada tahun 2021-2022 dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:

Gambar 2
Serapan Anggaran Pemda di Kuartal IV Tahun 2021-2022 (Purnamasari, 2023)



Sumber: Data Primer, 2025

Kemajuan suatu wilayah berkorelasi erat dengan pemerintah daerah. Kinerja mereka yang mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi memungkinkan daerah tersebut untuk mengoptimalkan potensinya. Optimasi dilakukan diantaranya melalui skema distribusi kekuasaan dan kewenangan yang baik, akuntabilitas dalam pengelolaan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja (Lestari, 2023). Diantara ratusan daerah di Indonesia, Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang dinilai sukses dalam mengoptimasi ketiga hal tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dimungkinkan untuk melahirkan inovasi dalam pelayanan publik pemerintah. Inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menjadikannya sebagai salah satu contoh bagi pelayanan publik nasional (Akmal, 2016).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti berfokus pada dua rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana tantangan sektor keuangan dan ekonomi di Indonesia pasca desentralisasi?; dan 2) Bagaimana kebijakan pemanfaatan TIK di Kab. Banyuwangi pada sektor keuangan dan ekonomi?.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan. Penelitian

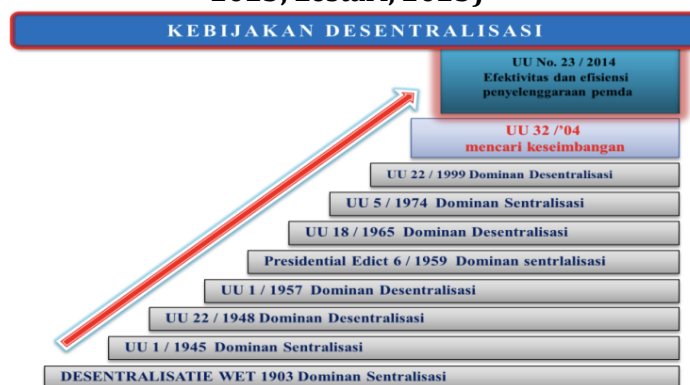
kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi sebuah isu dari perspektif partisipasi studi peneliti, dan memahami makna serta interpretasi terhadap perilaku, peristiwa atau obyek penelitian (Hennik, Hutter, & Bailey, 2011). Sementara metode Studi kepustakaan dijelaskan sebagai cara mengidentifikasi, mengumpulkan dan mensintesis teori dari penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan tujuan penelitian secara sistematis (Ridley, 2012). Metode ini dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang sebuah topik dan mampu menghasilkan interpretasi yang integratif dibandingkan dari investigasi secara individu (ermel, Lacerda, Morandi, & Gauss, 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

Optimasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Implementasi Kebijakan Daerah Otonom

Sistem otonomi dengan konsep desentralisasi di Indonesia sesungguhnya sudah dilaksanakan sejak sebelum kemerdekaan. Otonomi yang diterapkan sejak masa pendudukan Belanda hingga saat ini memiliki prinsip untuk memberikan kewenangan kepada area kabupaten/kota agar menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan asas desentralisasi serta tugas pembantuan. Perkembangan regulasi berkenaan dengan desentralisasi dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 3
Perkembangan regulasi tentang konsep desentralisasi di Indonesia (RI, 2018; Lestari, 2023; Lestari, 2023)



Sumber: Data Primer, 2025

Meski teridentifikasi memiliki banyak manfaat, namun desentralisasi juga memiliki kelemahan yang menurut Rudy dalam bukunya Hukum Pemerintahan Daerah (Buku Ajar) antara lain (Rudy, 2013):

- Organ pemerintah makin besar dan kompleks sehingga dapat mengganggu dan mempersulit koordinasi;
- Dimungkinkan untuk mengganggu keseimbangan dan keserasian daerah antara bermacam kepentingan;
- Dimungkinkan menguatnya konteks desentralisasi teritorial akibat sentiment kedaerahan;
- Durasi pengambilan Keputusan semakin lama;
- Biaya penyelenggaraan pemerintahan bertambah dan menambah tantangan keseragaman.

Sementara di bidang fiskal, desentralisasi fiskal memunculkan sejumlah tantangan, yakni (Lestari, 2023):

- Kualitas pemanfaatan dana transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) belum optimal karena pos belanja pegawai alokasinya hingga 65%;
- Tax ratio* pajak daerah belum dioptimalkan;
- Pemanfaatan pembiayaan daerah diantaranya melalui pinjaman daerah masih belum maksimal;
- Terjadinya *mismatch* antara program pusat dan daerah sehingga mengganggu sinergi;
- Realisasi belanja daerah belum sesuai harapan;
- Akuntabilitas dan pengelolaan APBD masih perlu penguatan materi.

Oleh karenanya, desentralisasi yang dilakukan diupayakan untuk mengatasi tantangan di atas. Implementasi kebijakan daerah otonom menuntut efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memainkan peran kunci dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Optimasi TIK dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat, mengelola data, dan memfasilitasi partisipasi publik. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten sering menghambat optimalisasi TIK. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran TIK dalam mendukung kebijakan daerah otonom serta strategi untuk mengoptimalkan penggunaannya.

TIK memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan daerah otonom. Pertama, TIK memfasilitasi pengelolaan data yang terintegrasi, memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan berbasis data (*data-driven decision making*). Menurut Haque (Haque, 2019), sistem informasi geografis (GIS) dan basis data terpusat dapat membantu pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya. Kedua, TIK meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui platform *e-government*, yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik secara *real-time* (Dwiyanto, 2015). Ketiga, TIK mendukung partisipasi publik melalui media sosial dan platform daring, memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan (A. Chadwick, 2013). Meskipun potensinya besar, optimasi TIK di daerah otonom menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah utama. Menurut penelitian Purbo (Purbo, 2018), infrastruktur TIK di daerah pedesaan seringkali terbatas, menghambat akses masyarakat terhadap layanan digital. Kedua, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola sistem TIK menjadi kendala serius. Studi yang dilakukan oleh Kurniawan dan Syarif (2020) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah kekurangan tenaga ahli IT yang mampu mengelola sistem informasi secara efektif. Ketiga, anggaran yang terbatas seringkali menjadi penghambat dalam pengembangan infrastruktur TIK (Sutabri, 2016).

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan TIK dalam implementasi kebijakan daerah otonom, beberapa strategi dapat diimplementasikan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur TIK, terutama di daerah tertinggal. Menurut Indrajit (Indrajit, 2017), pembangunan jaringan internet berkecepatan tinggi dan pusat data daerah dapat mengurangi kesenjangan digital. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Program pelatihan IT bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kompetensi dalam mengelola sistem informasi (K.C. Laudon, 2020). Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan. *Public-private partnership* (PPP) dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran (T. Bovaird, 2016). Oleh karenanya, penyelenggara pemerintahan di daerah otonom perlu lebih kreatif dan inovatif untuk mengatasi tantangan akibat dari desentralisasi.

Perkembangan Kebijakan Sektor Keuangan dan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi

Salah satu wilayah yang menjadi percontohan dalam mengoptimalkan potensi wilayahnya adalah Kabupaten Banyuwangi. Selama lebih dari satu dekade wilayah ini mampu meningkatkan pergerakan perekonomian di daerahnya. Kebijakan pemerintah daerah yang inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan ini. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan kebijakan sektor keuangan dan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan sumber daya alam, pariwisata, dan sektor kreatif, Banyuwangi telah berhasil menciptakan model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat sektor keuangan daerah. Salah satu kebijakan utama adalah pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Menurut penelitian oleh Sutrisno dan Wahyudi (E. Sutrisno, 45-60) sistem *e-budgeting* yang diterapkan di Banyuwangi telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga telah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan retribusi dan pajak daerah. Studi oleh Prasetyo dan Nugroho (A. Prasetyo, 2020) menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil meningkatkan PAD sebesar 15% per tahun sejak 2015. Pemerintah juga aktif menarik investasi melalui kebijakan insentif fiskal dan kemudahan perizinan. Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Banyuwangi mencatat peningkatan investasi sebesar 20% pada tahun 2022, terutama di sektor pariwisata dan pertanian (BKPM, 2022). Kebijakan ini didukung oleh pembangunan infrastruktur keuangan seperti perbankan syariah dan koperasi, yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan (Rahman & Hidayat, 2021).

Di sektor ekonomi, Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan strategi berbasis potensi lokal. Pariwisata menjadi sektor unggulan, dengan kebijakan seperti Festival Gandrung Sewu dan Banyuwangi Ethno Carnival yang berhasil menarik jutaan wisatawan setiap tahun (D. Purnomo, 2020). Selain itu, pemerintah daerah juga fokus pada pengembangan sektor pertanian melalui program peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk. Menurut penelitian oleh Wibowo dan Asmara (R. Wibowo, 2018), program "Banyuwangi Agripreneur" telah berhasil meningkatkan pendapatan petani sebesar 25% dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini telah menghasilkan peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar sebesar 30% sejak 2019 (UKM, 2021). Selain itu, Banyuwangi juga mengembangkan kawasan industri hijau (green industrial park) yang berfokus pada industri ramah lingkungan, seperti pengolahan hasil pertanian dan energi terbarukan (D. Saputra, 2022). Kebijakan sektor keuangan dan ekonomi yang diterapkan di Banyuwangi telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mencapai rata-rata 6,5% per tahun selama lima tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata nasional (Statistik, 2023). Selain itu, tingkat kemiskinan di Banyuwangi juga menurun dari 12% pada 2015 menjadi 8% pada 2022, menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan telah berhasil menciptakan pemerataan ekonomi (BPS, 2023).

Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, Kabupaten Banyuwangi masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, ketergantungan pada sektor pariwisata membuat perekonomian rentan terhadap guncangan eksternal, seperti pandemi COVID-19. Kedua, keterbatasan infrastruktur transportasi dan logistik masih menjadi kendala dalam menarik investasi skala besar. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah perlu memperkuat diversifikasi ekonomi, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan memperluas kerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah pusat.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TIK, seperti sistem e-budgeting, platform e-government, dan digitalisasi UMKM, telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, TIK juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata digital, peningkatan akses pasar bagi UMKM, dan fasilitasi investasi. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten masih perlu diatasi. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan investasi infrastruktur TIK, pelatihan SDM, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Dengan mengoptimalkan TIK, Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi besar untuk memperkuat sektor keuangan dan ekonomi, menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan studi mengenai optimasi TIK di sektor keuangan dan ekonomi Kabupaten Banyuwangi, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi TIK. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur TIK, terutama di wilayah pedesaan, untuk mengurangi kesenjangan digital. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) harus diintensifkan, khususnya bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pelaku UMKM, agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan inovasi berbasis TIK. Keempat, pengembangan platform e-government yang lebih terintegrasi dan user-friendly dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Terakhir, penting untuk menerapkan kebijakan keamanan siber yang robust guna melindungi data dan transaksi digital.

E. Referensi

- Chadwick, A., & May, C. (2003). Interaction between States and Citizens in the Age of the Internet: "e-Government" in the United States, Britain, and the European Union. *Governance*, 16(2), 271-300.
- Adisubrata, W. S. (2003). *Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia 2 (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi)*.

- Akmal, P. (2016, Oktober 26). Inovasi Pengelolaan Keuangan Banyuwangi Jadi Model Pelayanan Publik Nasional. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3329950/inovasi-pengelolaan-keuangan-banyuwangi-jadi-model-pelayanan-publik-nasional>
- Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 35-41.
- Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 35-41.\.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Ugm Press.
- E. Prasajo, T. K. (2019). *Inovasi PELayanan Publik di Era Desentralisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ermel, A. P. C., Lacerda, D. P., Morandi, M. I. W., & Gauss, L. (2021). *Literature reviews: modern methods for investigating scientific and technological knowledge*. Springer Nature.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). From government decentralization to decentralized governance. *Decentralizing governance: Emerging concepts and practices*, 326, 326.
- Cheema, G. S. (2011). Engaging civil society to promote democratic local governance: Emerging trends and policy implications in Asia. *Swedish International Centre for Local Democracy*.
- Crawford, G., & Hartmann, C. (2008). *Decentralisation in Africa: a pathway out of poverty and conflict?* (p. 264). Amsterdam University Press.
- Guntoro, M. (2011). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Cendekia Jaya Volume 3 No.2*, 1-9.
- Habibah, A. F. (2021, November 23). Sri Mulyani: Realisasi Belanja APBD baru 59,62 persen. Retrieved from antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/2540785/sri-mulyani-realisasi-belanja-apbd-baru-5962-persen>
- Haque, M. (2019). *Digital Governance and Public Administration*. New York: Routledge.
- Hari Suriadi, A. F. (2024). Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Meuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol. 18 No. 1*, 27-36.
- Hennik, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2011). *Qualitative Research Methods*. London: Sage Publications Ltd.
- Indonesia, C. (2023, November 3). Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah . Retrieved from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231011163705-569-1009967/hubungan-struktural-dan-fungsional-pemerintah-pusat-dan-daerah>
- J. Rodden, G. E. (2003). *Fiscal Decentralization and the Challenge of Hard BUDget Constraints*. Cambridge: MIT Press.
- Khairally, E. T. (2023, December 29). Mengenal 7 Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7114865/mengenal-7-potensi-sumber-daya-alam-di-indonesia>
- Kurniawan, A. (2018). *Desentralisasi dan pembangunan Daerah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, R. A. (2023). Tantangan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) Vol.3 No.1*, 61-67.
- Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. (1998). *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. Washington D.C.: THE World Bank .
- M. Turner, O. P. (2003). *Decentralization in Indonesia Redesigning the State*. Canberra: Asia Pacific Press.
- Mark Turner, D. H. (1997). *Governance, Administration and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.
- Nugroho, R. (2018). Desentralisasi dan tata Kelola Keuangan daerah: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 14 No. 1*, 56-70.
- Oates, W. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Jpurnal of economic Literature Vol.37 No.3*, 1120-1149.
- P. Bardhan, D. M. (2006). *Decentralization and Local Governance in Developing Countries: A Comparative Perspective*. Cambridge: MIT Press.
- Purbo, O. (2018). *Teknologi Informasi Untuk Daerah Tertinggal*. Jakarta: Elex Media Komputindo .
- Purnamasari, D. D. (2023, Januari 2). GENjot Serapan Anggaran, Kemendagri Usulkan 13 Solusi bagi Pemda. Retrieved from [kompas.id: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/02/genjot-serapan-anggaran-kemendagri-usulkan-13-solusi-bagi-pemda](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/02/genjot-serapan-anggaran-kemendagri-usulkan-13-solusi-bagi-pemda)

- Putri, C. A. (2021, November 23). Sri Mulyani Sentil Kepala Daerah, Uang Rakyat Malah Ditahan ! Retrieved from [cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20211123153210-4-293779/sri-mulyani-sentil-kepala-daerah-uang-rakyat-malah-ditahan](https://www.cnbcindonesia.com/news/20211123153210-4-293779/sri-mulyani-sentil-kepala-daerah-uang-rakyat-malah-ditahan)
- RI, B. P. (2018, November). Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah. Retrieved from [mpr.go.id: https://mpr.go.id/pengkajian/01_HKBP_KA_Pelaksanaan_Otonomi_Daerah_Unibraw.pdf](https://mpr.go.id/pengkajian/01_HKBP_KA_Pelaksanaan_Otonomi_Daerah_Unibraw.pdf)
- Ridley, D. (2012). *The Literature Review A Step-by-step Guide for Students*. London: Sage Publications.
- Rudy. (2013). *Hukum Pemerintahan Daerah (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: PKKPU Unila.
- Saito, F. (2008). Decentralization and Local Governance: INTRODUCTION and Overview. In F. Saito, *Foundation for Local Governance (Decentralization in Comparative Perspective)* (pp. 1-24). Otsu: Physica-Verlag.
- Santia, T. (2022, Januari 11). Sri Mulyani Blak-Blakan 3 Masalah Pengelolaan APBD 2021. Retrieved from [liputan6.com: https://www.liputan6.com/bisnis/read/4856558/sri-mulyani-blak-blakan-3-masalah-pengelolaan-apbd-2021?page=2](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4856558/sri-mulyani-blak-blakan-3-masalah-pengelolaan-apbd-2021?page=2)
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. I. (2024). Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* Vol. 1 No.1, 27-36.
- Sutabri, T. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Andi Offset.
- Sutrisno, B. (2020). Desentralisasi dan Inovasi Pelayanan Publik: Studi Kasus Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Administrasi Publik* Vol.15 No.2, 123-140.